

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Danial, Endang, dkk. 2007. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Laboratorium PKN – FPIPS.
- Misdianti, dkk. 1990. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Siagian, Sondang P. 1979. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sobandi, Baban. 2005. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung : Humaniora.
- Sudirwo, Daeng. 1980. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan di Desa*. Bandung : Angkasa.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suriakusumah, dkk. 2008. *Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung : Laboratorium PKN – FPIPS.
- Syarifin, Pipin. 2006. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thoha, Miftah. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : CV Fokusmedia.
- Waworuntu.\_\_\_\_\_.*Dasar-Dasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wursanto, IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian 2*. Yogyakarta : Kanisius.

Wursanto, IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian 1*. Yogyakarta : Kanisius.

## **B. Sumber Lain.**

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Peberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum.

Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberitahuan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

